

**ANALISIS PENGARUH PAD DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN DAERAH  
DI KABUPATEN dan KOTA se-JAWA TIMUR**

**Muhammad Yasin<sup>1</sup>, Kasino<sup>2</sup>**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Surabaya  
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo  
[Muhammadyasin261092@gmail.com](mailto:Muhammadyasin261092@gmail.com)<sup>1</sup>, [kasinows507@gmail.com](mailto:kasinows507@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

Economic growth is the process of continually changing a country's economic condition towards a better condition for a certain period. Economic growth can also be interpreted as a process of increasing the production capacity of an economy that is realized in the form of an increase in national income. Free variable PAD (X1) Measured using: (1) Tax, (2) Non-tax, Development expenditure (X2) Measured using: (1) Development, (2) Growth. Independent variables Regional financial performance is measured using: (1) efficiency ratio, (2) effectiveness ratio, (3) independence ratio, (4) activity ratio. economic growth with this means that if the regional income will cause an increase in the achievement of economic growth. which is very flexible in terms of its utilization, causing regions to be more flexible in planning budget allocations for development activities in accordance with their economic agendas which include building basic facilities and infrastructure that play a role in supporting optimal economic growth

**Keyword : PAD, Belanja Pembangunan, Kinerja Keuangan,**

**1. PENDAHULUAN**

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun anggaran belanja fiskal Jawa Timur Tahun 2016 sebesar Rp148,30 triliun, dengan pangsa terbesar pada belanja APBD kabupaten/kota yang mencapai Rp83,78 triliun. Demikian pula anggaran pendapatan sebesar Rp109,53 triliun, sebagian besar juga ditopang oleh

APBD kabupaten/kota dengan nilai mencapai Rp85,16 triliun. Untuk Total anggaran belanja fiskal Jawa Timur tahun 2016 mencapai Rp148,30 triliun, meliputi belanja APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp24,75 triliun (pangsa 16,69%), belanja APBD kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp83,78 triliun (pangsa 56,49%) dan belanja APBN sebesar Rp39,77 triliun (pangsa 26,82%). Secara spasial, anggaran belanja APBD kabupaten/kota tertinggi diraup oleh Kota Surabaya yang mencapai Rp7,94 triliun dan terendah Kota Blitar yaitu

sebesar Rp847 miliar. Sampai dengan triwulan II 2016, realisasi belanja untuk ketiga anggaran belanja tersebut relatif baik. Realisasi anggaran belanja APBD Provinsi Jawa Timur mencapai 21,35% dengan realisasi terbesar pada belanja operasi (22,22%). Anggaran belanja APBD kabupaten/kota terealisasi sebesar 33,90%, sedangkan belanja APBN terealisasi sebesar 38,56%. Kota Blitar menjadi Kabupaten/Kota dengan realisasi belanja terbesar di triwulan ini, yaitu 42,05% seiring dengan tingginya realisasi belanja operasi yang mencapai 45,14%. Sementara itu, realisasi terendah terjadi di Kota Mojokerto yaitu sebesar 7,59% karena terbatasnya realisasi belanja modal. Analisis rasio keuangan pada APBD dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, atau dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Widodo dalam Halim, 2012).

Dari sisi pendapatan, total anggaran pendapatan tahun 2016 sebesar Rp109,53 triliun, terdiri dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp24,37 triliun (share 22,25%) dan APBD kabupaten/kota sebesar Rp85,16 triliun (share 77,75%). Realisasi penerimaan APBD Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II 2016 mencapai 26,29%, didorong oleh pendapatan transfer dan PAD. Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota sebesar 46,69% sejalan dengan tingginya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer yang masing-masing mencapai 49,27% dan 46,22%. Anggaran pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 meningkat 9,54% didorong oleh pendapatan transfer. Sementara itu, anggaran belanja meningkat 1,62% didorong oleh belanja operasi dan belanja tak terduga. Anggaran pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar Rp24,37 triliun, meningkat 9,54% dibandingkan tahun 2015. Sementara anggaran belanja dan transfer sebesar Rp24,75 triliun atau meningkat 1,62%. Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Timur Peningkatan terbesar anggaran pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 terutama bersumber dari pendapatan transfer yang naik 24,48% (Rp1,78 triliun), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang biasanya menjadi pendorong utama

pertumbuhan, pada tahun 2016 hanya tumbuh 2,32% (naik Rp345 miliar).

**Tabel 1**  
**Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016, Juta Rupiah**

Uraian	APBD Provinsi Jawa Timur		% Perubahan
	Th. 2015 (Juta Rp)	Th. 2016 Juta Rp	
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	24,361,066	24,755,743	1.62
BELANJA	16,196,609	17,868,843	10.32
BELANJA OPERASI	13,753,199	15,535,153	12.96
BELANJA PEGAWAI	2,686,353	3,517,703	30.95
BELANJA BARANG	5,138,218	4,585,999	-10.75
BELANJA BUNGA	2,839	1,788	-37.03
BELANJA SUBSIDI	-	-	
BELANJA HIBAH	5,909,137	7,410,915	25.41
BELANJA BANTUAN SOSIAL	16,652	18,748	12.59
BELANJA MODAL	2,368,410	2,233,690	-5.69
BELANJA TANAH	5,155	78,976	1,432.03
BELANJA PERALATAN DAN MESIN	881,539	860,658	-2.37
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	915,916	910,653	-0.57
BELANJA JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	546,017	363,791	-33.37
BELANJA ASET TETAP LAINNYA	3,940	3,160	-19.79
BELANJA ASET LAINNYA	15,843	16,452	3.84
BELANJA TAK TERDUGA	75,000	100,000	33.33
TRANSFER	8,164,457	6,886,901	-15.65
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	4,994,366	5,230,830	4.73
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	3,170,091	1,656,071	-47.76

Sumber: BPKAD Jawa Timur

Sebaliknya, anggaran belanja modal justru turun dari Rp2,37 triliun menjadi Rp2,23 triliun (-5,69%), dengan penurunan terbesar pada belanja jalan, irigasi dan jaringan. Telah selesainya pembangunan waduk besar di Jawa Timur dan baru dimulainya pembangunan beberapa waduk dengan skala sedang diindikasikan mengurangi kebutuhan anggaran untuk kelompok tersebut. Lebih lanjut, pembangunan jalan tol yang telah mencapai lebih dari 50% (antara lain Jalan Tol Jombang-Mojokerto) turut mengurangi kebutuhan anggaran untuk kelompok tersebut. Meskipun demikian, terdapat peningkatan signifikan untuk belanja tanah dari Rp5,16 miliar menjadi Rp78,98 miliar (naik 1.432%).

Dimulainya beberapa pembangunan infrastruktur di Jawa Timur di tahun 2016 meningkatkan kebutuhan akan pembebasan tanah, sehingga dibutuhkan anggaran belanja tanah yang memadai untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut. Dan dalam pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia (SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal, dimana kewenangan pendanaan yang diserahkan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan (2) mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah (Mardiasmo, 2006).

APBD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Anggaran pendapatan meningkat 10,76% dibandingkan tahun 2015, sebaliknya anggaran belanja justru turun 4,81%. Anggaran belanja terbesar di miliki oleh Kota Surabaya (Rp7,94 triliun), sedangkan Kota Blitar memiliki anggaran belanja terendah yaitu Rp847,1 miliar. Anggaran pendapatan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2016 mengalami perubahan, yakni dari Rp82,2 triliun menjadi Rp 85,2 triliun. Anggaran pendapatan perubahan pada 2016 ini meningkat 10,76% dibandingkan tahun 2015. Sementara

untuk anggaran belanja juga mengalami perubahan, yakni dari Rp88,8 triliun menjadi Rp83,8 triliun. Perubahan tersebut menyebabkan anggaran belanja tahun ini mengalami penurunan sebesar 4,81% dibandingkan anggaran belanja tahun 2015.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota dari total anggaran pendapatan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mencapai Rp85,2 triliun, anggaran terbesar berada di Kota Surabaya (Rp6,98 triliun dengan share 8,19%) sedangkan yang terkecil di Kota Mojokerto (Rp832 miliar dengan share 0,98%). APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur Secara kumulatif, sumber pendapatan terbesar anggaran pendapatan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur adalah pendapatan transfer, yang mencapai 79,67% dari total anggaran. Tingginya komposisi pendapatan transfer menunjukkan ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya di dukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

Menurut Lewis dalam Ahyani (2010) Tidak efektifnya berbagai peraturan yang dilakukan pemerintah bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik. Perlu adanya kebijakan peraturan daerah yang tepat untuk melakukan pungutan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. PAD sebagai sumber utama penghasilan bagi daerah. PAD terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Ketiga kategori tersebut tercantum dalam UU No.33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah yang menjadi sorotan publik yang dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh daerah. Pada umumnya, pemerintah pusatlah yang akan

menentukan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Kategori kedua dari Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan biaya, denda, dan lisensi. Sumber pendapatan ini terikat dengan seseorang untuk membayar pelayanan tertentu yang dipergunakannya. Pemerintah daerah memungut biaya atas pelayanan dan lisensi yang sudah disediakan. dari Pendapatan Asli daerah penghasilan dari utilitas dan perusahaan daerah. Perusahaan daerah mendapatkan penghasilan melalui pembebanan biaya atas barang maupun jasa yang ditawarkannya. Pada prinsipnya pembebanan wilayah ini memainkan peran fiskal dan regulasi berupa Pengumpulan pendapatan dan mengatur permintaan jasa dengan meminimalisasi pelanggaran yang sering terjadi dalam pelayanan publik yang bebas biaya. Jadi Pendapatan Asli Daerah adalah Pemerintah daerah melalui upayanya memenuhi kewajiban daerah salah satu tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut pemerintah diharapkan dapat mempunyai sistem keuangan sendiri baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat.

### **Belanja pembangunan**

Menurut Mardiasmo (2009:66) mengemukakan belanja pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi dua jenis yaitu belanja rutin dan belanja modal. belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya. pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan, maupun pembangunan nonfisik spiritual seperti misalnya penataran, training dan sebagainya, sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi, dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan dalam Repelita. Misalnya dalam Pelita 1 pembangunan dititik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian, dan Pelita II tetap menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri

yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan seterusnya. Selain membiayai pengeluaran sektoral melalui departemen/lembaga, pengeluaran pembangunan juga membiayai proyek-proyek khusus daerah yang dikenal sebagai proyek Inpres (Instruksi Presiden), baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun masing-masing daerah. Bantuan pembangunan bagi daerah dimaksudkan juga sebagai perwujudan dari asas pemerataan pembangunan antar wilayah dan sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih mampu melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri. Selain daripada itu, pemberian bantuan pembangunan bagi daerah juga dimaksudkan untuk mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat di daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab dalam pembangunan. Besarnya alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara Universitas Sumatera Utara serta beberapa faktor yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah, seperti banyaknya penduduk dan luas wilayah. Dengan demikian proyek-proyek yang akan dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah sejalan dengan pembangunan di daerah lain. Agar proyek-proyek

pembangunan yang akan dibiayai dengan dana bantuan pembangunan daerah tersebut dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, serta mampu mendukung proyek-proyek pembangunan lainnya dalam perumusan program dan proyek pembangunan bagi daerah, maka dalam proses perencanaannya senantiasa diikutsertakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari tiap daerah yang bersangkutan (Djamin, 1993:73)

ichwan (1997 : 27) mendefinisikan belanja pembangunan sebagai berikut: “Belanja Pembangunan adalah pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi (proyek–proyek) baik berbentuk proyek fisik maupun non fisik”. Sedangkan menurut Baswir (1997 : 45) Belanja Pembangunan adalah: sebagai pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan diajukan untuk melaksanakan tugas–tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Belanja Pembangunan tersebut meliputi belanja pembangunan dalam bentuk rupiah dan belanja pembangunan dalam bentuk bantuan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. Belanja pembangunan dalam bentuk rupiah bersumber dari tabungan

pemerintah dan bantuan program yang digunakan untuk membiayai belanja-belanja sektoral melalui departemen atau lembaga non departemen dan dialokasikan pula untuk membiayai proyek-proyek.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja pembangunan adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

### **Kinerja keuangan daerah**

Pengertian Kinerja Pengertian kinerja seperti yang dikemukakan oleh Bastian (2001: 329) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Tujuannya untuk: 1)mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur dari Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi selama tiga tahun terakhir (2013-2015), dan 2)mengetahui kemampuan keuangan daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2015 diukur melalui share dan growth APBD, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah rasio keuangan yang meliputi: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Kedua, indeks kemampuan keuangan serta peta kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode kuadran. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1)tingkat kemandirian keuangan Propinsi Jawa Timur dalam pengelolaan keuangan daerahnya sangat baik. Rata-rata rasio kemandirian diperoleh sebesar 322,74% yang artinya Propinsi Jawa Timur telah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya. 2) tingkat desentralisasi fiskal Propinsi Jawa Timur menunjukkan sangat baik, dengan diperoleh rata-rata sebesar 70,80%. 3)tingkat efektivitas pemerintah Propinsi Jawa Timur telah mencapai target, dengan

diperoleh rata-rata sebesar 111,53% yang artinya Propinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan sangat efektif. 4) tingkat efisiensi pengeluaran belanja terhadap pendapatan memiliki perolehan rata-rata sebesar 99,25% yang memiliki kecenderungan kurang efisien, artinya suatu bentuk pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi fiskal tidak cermat sehingga menjadi tidak tepat sasaran. 5) hasil analisis kemampuan keuangan daerah menunjukkan share rendah sedangkan growth tinggi, dari hasil yang diperoleh berdasarkan metode kuadran, Propinsi Jawa Timur berada pada posisi kuadran II, yaitu menunjukkan kondisi yang masih belum ideal. Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut.

Hal ini dikarenakan semakin besar PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah serta semakin kecil pinjaman dan bantuan pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut. Dengan semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan daerah tersebut mampu mengelola dengan ekonomis, efisien, dan efektif serta kurangnya campur tangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

dikarenakan adanya peningkatan porsi PAD terhadap pendapatan total. Semakin meningkat porsi tersebut, maka akan mendorong dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pada rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD pada masing-masing daerah tidak terlalu signifikan atau kurang memenuhi ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Dengan kurang adanya perbedaan yang signifikan tersebut, maka kurang mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Untuk rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan pada level 0,05 terhadap

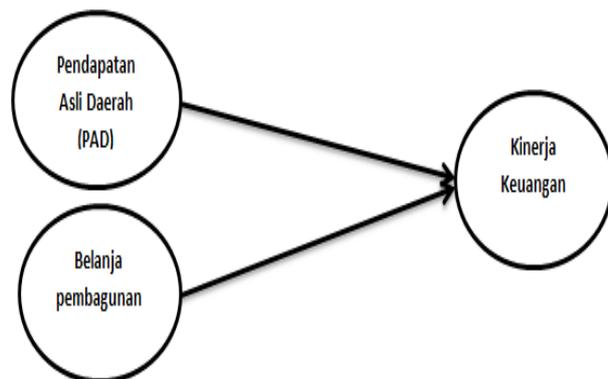
pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan realisasi belanja yang dikeluarkan lebih kecil daripada realisasi pendapatan yang diterima atau adanya efisiensi. Dengan adanya efisiensi, maka kelebihan atau surplus dialokasikan pada belanja lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

**KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

**Kerangka Konseptual**

Pada bab ini akan dijelaskan kerangka konsep penelitian, hipotesis penelitian dan definisi operasional. Kerangka konsep penelitian akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori. Dengan demikian kerangka konsep diperlukan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan suatu penelitian yang dikembangkan dari tinjauan teori sehingga mudah dipahami. Gambaran mengenai variabel penelitian dapat diperoleh melalui kerangka konsep, yang dikategorikan kedalam kelompok *independent*, *dependent*, dan *confounding*. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan sementara peneliti yang akan diuji kebenarannya yang dinyatakan dalam hipotesis alternatif, sebagai suatu petunjuk dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan suatu hasil. Definisi operasional adalah definisi berdasarkan

karakteristik yang diamati dari variabel yang diteliti untuk memperjelas maksud dari penelitian yang dilakukan.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

**HIPOTESISI**

H1 : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

H2 : Terdapat pengaruh signifikan belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Data daerah penelitian**

Tabel 2  
 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tmur

Kabupaten		Kabupaten	
1	Pacitan	21	Ngawi
2	Ponorogo	22	Bojonegoro
3	Trenggalek	23	Tuban
4	Tulungagung	24	Lamongan
5	Blitar	25	Gresik
6	Kediri	26	Bangkalan
7	Malang	27	Sampang
8	Lumajang	28	Pamekasan
9	Jember	29	Sumenep
10	Banyuwangi	<b>Kota</b>	
11	Bondowoso	1	Kediri
12	Situbondo	2	Blitar
13	Probolinggo	3	Malang

14	Pasuruan		4	Probolinggo
15	Sidoarjo		5	Pasuruan
16	Mojokerto		6	Mojokerto
17	Jombang		7	Madiun
18	Nganjuk		8	Surabaya
19	Madiun		9	Batu
20	Magetan			

Tabel 2 menjelaskan tentang kabupaten dan kota di Jawa Timur dimana terdapat di 29 kabupaten dan 9 kota sehingga dapat deskripsikan pada table yang sudah dikelompokkan setiap variabelnya.

## Analisis dan Hasil Penelitian

### Uji Statistik

Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan melihat signifikansi pengaruh antar variable dengan melihat koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic. Pada PLS hal tersebut dilakukan dengan melihat *Algorithm Bootstrapping report*, berikut hasilnya :

Tabel 3  
*Path Coefficients* (Mean, STDEV, T-Values, P-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Hipotesis
PAD-> Kinerja Keuangan	-0.392	-0.394	0.225	1.977	0.041	Sig
Belanja Pembangunan-> Kinerja Keuangan	-0.078	-0.049	0.218	0.729	0.878	Tdk.Sig

*Diolah oleh peneliti*

*Path Coefficient* menunjukkan tingkat signifikansi dan hubungan antar variabel. Dengan demikian memberikan hasil sebagai berikut :

### H1 : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah di kabupaten dan kota se-jawa timur adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 1.977 (<1,96). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.392 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah adalah negatif.

Dapat diartikan Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh beberapa Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber yang terlihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Kabupaten Kota tidak berjalan secara maksimal. Menurut Lewis

dalam Ahyani (2010) Tidak efektifnya berbagai peraturan yang dilakukan pemerintah bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik. Selain itu pembebanan biaya atas barang maupun jasa yang ditawarkan yang harus ditanggung oleh perusahaan daerah turut serta mengurangi output yang dihasilkan. Dengan kurang maksimalnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah tentu akan mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. karena tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak terlepas dari tingkat kenaikan PDRB daerah tersebut. Jadi sangat penting untuk pemerintah daerah memaksimalkan sektor pendapatannya agar mendapat output yang maksimal di setiap sektornya.

**H2 : Terdapat pengaruh signifikan belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur**

Belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 0.729 ( $<1,96$ ). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.078 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap Kinerja keuangan adalah negatif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiono (2014) yang menemukan ada pengaruh positif signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah yang dananya dapat berasal dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi pendapatan asli daerah lebih besar dari pada kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang dialokasikan untuk belanja daerah yang salah satunya untuk belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Darsono (2013) yang menemukan ada pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan rasio kemandirian namun tidak signifikan. Bertentangan juga dengan penelitian Imawan dan Wahyudin (2014) serta Darwis (2015) yang menemukan belanja modal berpengaruh dengan arah negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mengoptimal belanja modal untuk meningkatkan kemandirian daerah serta proporsi belanja modal yang

menyentuh langsung kepada publik belum mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini menguji “Analisis struktur APBD terhadap kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa:

1. PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah di kabupaten dan kota se-jawa timur adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 1.977 ( $<1,96$ ). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.392 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah adalah negatif.
2. Belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 0.729 ( $<1,96$ ). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.078 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap Kinerja keuangan adalah negatif.

### Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan yang ada disetiap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur untuk tetap dipantau oleh Kepala Daerah supaya bisa di maksimalkan keuangan tersebut dalam Pertumbuhan Ekonomi di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
2. Diharapkan penelitian selanjutnya, studi atau kajian yang akan dilakukan sebaiknya mencakup variabel lain untuk dikembangkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali”, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya, hal. 1140.
- Abdul Halim.2008. Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). UUP STIM
- Adi Priyo Hari, 2006. “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali”, Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Adi, Priyo Hari. 2007. “Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi”. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ahyani, Wahid. 2010. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah,

- Dan Pengganguran Pasca Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah). Skripsi, Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- BPS, Statistik Jawa Timur dalam Angka, Surabaya: Jawa Timur, Badan Pusat Statistik.
- Darsono dan Ashari. 2010. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan (Tips Bagi Investor, Direksi, dan Pemegang Saham). Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2007. Analisis Keuangan Daerah; Pendekatan Makro”, Model Program PMSES, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta
- Kawedar, warsito dkk, 2008. Akuntansi Sektor Publik, Semarang UNDIP
- Maharani, Astri Dhiah, Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Bank Mega Syariah Cabang Semarang, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Mamesah DJ Sistem Administrasi Keuangan Daerah Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1995
- Mardiasmo, 2002. “Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah”. Makalah. Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
- Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang dana perimbangan
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah”. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- \_\_\_\_\_. 2004. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5, No. 2, Desember 2004, hal. 147-159.
- \_\_\_\_\_, 2004, Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Yogyakarta: STIE YKPN.
- \_\_\_\_\_, Statistik Propinsi Jawa Timur dalam Angka, Surabaya: Jawa Timur, Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2004. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5, No. 2, Desember 2004, hal. 147-159.
- \_\_\_\_\_, 2004, Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Yogyakarta: STIE YKPN.
- BPS, Statistik Jawa Timur dalam Angka, Surabaya: Jawa Timur, Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_, Statistik Propinsi Jawa Timur dalam Angka, Surabaya: Jawa Timur, Badan Pusat Statistik.
- (<http://tesismanajemen.com/manajemen-keuangan-daerah>)
- (<http://chandraekapurwanto.blogspot.co.id/2013/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>)
- (<https://www.scribd.com/doc/98370085/Analisis-Apbd-Provinsi-Jawa-Timur>)

